PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 18 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN BIDANG GARAPAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa dengan adanya bidang garapan baru Panitia Khusus Penyempurnaan Raperda untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon akan dilakukan Penambahan Bidang Garapan Panitia Khusus;

b. Penambahan Bidang Garapan Panitia Khusus Penyempurnaan Raperda sebagaimana huruf a, dipandang perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 15 tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

C. bahwa Pembentukan Panitia Khusus Penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERUBAHAN BIDANG GARAPAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANSUS I
A. **SUSUNAN PERSONALIA :**

1. H. MAHMUDI, S.PdI	KETUA
2. Hj. NANA KENACANAWATI, S.PdI	WAKIL KETUA
3. NURHOLIS, S.Pdi	SEKRETARIS
4. R. HASAN BASORI, SE. MSi	ANGGOTA
5. Hj. AMENAH,SE	ANGGOTA
6. ABDUL ROHMAN	ANGGOTA
7. SISKA KARINA, SH. MH	ANGGOTA
8. YAYAT HIDAYAT, ST	ANGGOTA
9. MOCH. GHOFUR AKBAR	ANGGOTA
10. TITI SUMANTI	ANGGOTA
11. MUKLISIN NALAHUDIN,SH.MH	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS II
A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. DARUSA, SH	KETUA
2. MUNAWIR, SH	WAKIL KETUA
3. Hj. ERYATI	SEKRETARIS
4. H. TANUNG HIDAYAT	ANGGOTA
5. EMHA SYAHIRUL ALAM, SE	ANGGOTA
6. ROHAYATI, A.Md	ANGGOTA
7. SYAHRIL ROMADHONI, SE	ANGGOTA
8. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap	ANGGOTA
9. SOFATILAH, SH	ANGGOTA

10. SURYANTI	ANGGOTA
11. AHMAD FAWAZ, S.TP	ANGGOTA
12. TARSENI	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS III
A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. Dr. Hj. HANIFAH, MA.	KETUA
2. ANTON MAULANA, ST.MM	WAKIL KETUA
3. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc	SEKRETARIS
4. MAD SALEH	ANGGOTA
5. H. MUSTOFA, SH	ANGGOTA
6. CARILA ROHANDI, SE	ANGGOTA
7. ROSIHAN RUSMANA	ANGGOTA
8. H. MULUS TRISLA AGENG, SE	ANGGOTA
9. H. HERMANTO, SH	ANGGOTA
10. Dra. TATI SUHAETI	ANGGOTA
11. MAMAT SURAHMAT	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS IV
A. **SUSUNAN PERSONALIA :**

1. AAN SETYAWAN, S.Si	KETUA
2. H. SOFWAN, ST	WAKIL KETUA
3. HERIYANTO, ST	SEKRETARIS
4. PANDI, SE	ANGGOTA
5. Hj. ISMIYATUL F. YUSUF, B.Comm.M.PA	ANGGOTA
6. YOGA SETYAWAN, SE	ANGGOTA
7. H. KHANAFI, SH. MH	ANGGOTA
8. R. CAKRA SUSENO, SH	ANGGOTA

9. ASEP ZAENUDIN BUDIMAN ANGGOTA

10. H. JUNAEDI, ST ANGGOTA

11. Drs. H.MOHAMAD RIDWAN, M.Pdi ANGGOTA

12. H. MAHMUD JAWA, SH ANGGOTA

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;

b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Bidang Garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut :

a. Bidang Garapan Pansus I :
   - Rancangan Perda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
   - Rancangan Perda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

b. Bidang Garapan Pansus II :
   - Rancangan Perda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Lingkup Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
   - Rancangan Perda tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

c. Bidang Garapan Pansus III :
   - Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2021 -2036.
   - Rancangan Perda tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Bidang Garapan Pansus IV :
   - Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KELIMA : Masa kerja Panitia Khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dan paling lama 1 (satu) tahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 29 Nopember 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

MOHAMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.